

MODEL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK JAWA TENGAH

Budi Widjajanto¹, Yuliman Purwanto², Nova Rijati³

¹Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro

²Teknik Elektro Universitas Dian Nuswantoro

³Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro

Jl Nakula I No. 5 -11 Semarang 50131

Email : budi-w@dosen.dinus.ac.id¹, yp@dosen.dinus.ac.id², novaola@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model tatakelola teknologi informasi untuk pelayanan informasi publik Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi layanan-layanan pada website pemerintah dengan cara studi pustaka/dokumentasi dan observasi website pemerintah Kabupaten Wonogiri, Cilacap, Kudus, Semarang, Pekalongan dan Kebumen berdasarkan tingkatan e-government, kualitas konten informasi dan ketersediaan konten informasi pada website berdasarkan ketentuan UU No. 14/2008, serta melakukan diskusi terarah dengan pihak-pihak yang terkait. Dan berdasarkan peta layanan informasi publik kemudian dirumuskan suatu model layanan informasi publik berbasis teknologi informasi berdasarkan pemetaan kondisi pelayanan publik. Hasilnya dari 6 website pemerintah Kabupaten, layanan situs masih bersifat informatif dan didukung dengan konten informasi yang berkualitas (akurat, terkini dan relevan), serta kersediaan konten-konten informasi publik pada situs pemerintah berdasarkan UU No. 14/2008 sebesar 43%, sehingga diperlukan peningkatan layanan atau fungsi pada situs pemerintah menjadi interaktif dengan menambah konten-konten informasi publik dalam bentuk web portal agar sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata kunci: informasi publik, teknologi informasi, e-government

Abstract

This study aims to produce a model for information technology governance of public information services of Central Java. Activities undertaken is to identify services on government websites by studying literature / documentation and observation of government websites in Wonogiri, Cilacap , Kudus, Semarang , Pekalongan and Kebumen based on level of e-government , the quality of information content and availability of information content on the website under the provisions of Law no. 14/2008, as well as focused discussions with the relevant parties . And based on public information service map and then formulated a public information service model based on information technology and public service condition mapping. The results of the 6 District government website, the site still informative and supported by quality information content (accurate, current and relevant) , as well as the public information contents on government websites based on Law no. 14/2008 by 43 % , necessitating an increase in the services or functions on government websites to become interactive by adding contents of public information in the form of a web portal to conform with the provisions of Law no. 14 of 2008 on Public Information .

Keywords: public information, information technology, e-government

1. PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik [1]. Untuk mewujudkan misi *good governance* ini, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) [2] dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 [3]. Selanjutnya secara resmi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2010. Tujuan diterapkannya undang-undang tersebut antara lain untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Sehingga Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 3 UU 14/2008.

Dalam konteks melaksanakan amanah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan suatu terobosan khusus dalam pemanfaatan website pemerintah guna menyediakan akses dan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana. Kategori layanan dan informasi public yang dapat diperoleh oleh masyarakat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta

merta. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menyediakan sistem layanan informasi publik dimaksud adalah dengan membangun website dengan satu pusat layanan [4]. Pemanfaatan e-Government untuk pelayanan informasi publik telah diimplementasikan oleh Pemerintah Romania [5], bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Sedangkan strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (*one-stop centre*) [6], terdiri dari empat tahap pengembangan yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horizontal. Dalam konteks menyediakan akses dan layanan informasi publik sesuai amanah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan portal informasi publik yang menyediakan layanan *one-stop centre* yang mampu mengintegrasikan layanan informasi publik dari berbagai badan publik serta menyediakan akses dan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana.

2. METODE

Pada penelitian ini dilakukan kajian terhadap model tata kelola TI pada layanan publik yang sudah dilaksanakan dan kemudian berdasarkan kajian itu merumuskan suatu model tata kelola TI untuk pelayanan informasi publik.

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memetakan kondisi layanan publik pada website pemerintah.
Bertujuan untuk mengidentifikasi layanan-layanan pada website Pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan dengan cara :
 1. studi pustaka dan studi dokumentasi Undang Undang dan Peraturan Peraturan tentang penerapan e-government serta hasil-hasil penelitian terdahulu ;
 2. menentukan sampel website dengan metode purposive random sampling, yaitu Kabupaten Wonogiri (W) mewakili Karesidenan Solo, Kabupaten Cilacap (C) mewakili Karesidenan Banyumas, Kabupaten Pekalongan (P) mewakili Karesidenan Pekalongan, Kabupaten Kudus (Kd) mewakili Karesidenan Pati, Kabupaten Semarang (S) mewakili Karesidenan Semarang dan Kabupaten Kebumen (Kb) mewakili Karesidenan Kedu
 3. melakukan analisis website yang diobservasi dengan cara : membuat peta website (site map);
 4. menganalisis layanan website berdasarkan tingkatan e-government
 5. menganalisis kualitas konten informasi
 6. memetakan ketersediaan konten informasi pada website berdasarkan ketentuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 7. melakukan diskusi terarah dengan pihak-pihak yang terkait
2. Pemodelan layanan informasi publik berbasis TI.
Berdasarkan pemetaan kondisi layanan publik berbasis TI pada 6

(enam) website sampel, selanjutnya dilakukan pemodelan layanan informasi publik pada website pemerintah secara umum, dengan cara :

1. mengidentifikasi kanal-kanal (jalur layanan) portal informasi publik berdasarkan karakteristik daerah serta ketentuan perundangan yang berlaku;
2. merumuskan konten informasi publik;
3. merancang jenis layanan informasi publik;

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Layanan Website Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Tingkatan E-government

Hasil analisis observasi layanan website pemerintah kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pekalongan, Kudus, Semarang dan Kebumen berdasarkan tingkatan e-government adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Tabel Layanan website berdasarkan tingkatan e- government

Jenis layanan e-gov	Website Pemerintah Kabupaten					
	W	C	P	Kd	S	Kb
Informatif	71	133	73	249	33	101
Interaktif	-	-	-	-	-	-
Interaktif kolaboratif	-	-	-	-	-	-
One-stop service	-	-	-	-	-	-
Information push	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa keenam website berada pada tingkatan yang paling awal dalam *E-Government*, yakni untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik serta menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, *E-Government* tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam website tersebut. Dengan kata lain, informasi

yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah.

3.2 Kualitas Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten

Hasil analisis observasi layanan website pemerintah kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pekalongan, Kudus, Semarang dan Kebumen berdasarkan kualitas konten informasi tersaji dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2: Tabel Kualitas Informasi

Website Pemerintah	Kualitas Informasi		
	Akurasi	Kekinian	Relevansi
Wonogiri	97%	94%	97%
Cilacap	100%	77%	100%
Pekalongan	74%	74%	74%
Kudus	98%	98%	100%
Semarang	91%	91%	91%
Kebumen	89%	89%	89%
Rata-rata	94%	89%	95%

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa konten informasi pada website pemerintah sudah berkualitas dengan tingkat akurasi rata-rata 94%, tingkat kekinian 89% dan relevansi 95%.

3.3 Ketersediaan Konten Informasi Publik Pada Website Pemerintah

Ketersediaan konten informasi website yang sesuai dengan ketentuan UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik dilakukan dengan menganalisis website sampel dengan memetakannya sesuai dengan pasal dan ayat yang ada pada UU tersebut. Dan hasilnya seperti terlihat dalam tabel 3, yang dapat disimpulkan bahwa konten informasi publik berdasarkan UU No.14/2008 pada situs pemerintah kabupaten di Jawa Tengah adalah 43%.

Tabel 3: Tabel Ketersediaan Konten Informasi Sesuai UU No.14/2008

No	UU No. 14/2008			Website Pemerintah Kabupaten					
	PsI	Ayt	Hrf	W	C	P	Kd	S	Kb
1	9	2	A	√	√	√	√	√	√
2			B	X	-	X	-	X	X
3			C	X	√	√	√	√	√
4	10	1		√	√	√	√	√	√
5	11	1	A	X	X	X	X	X	X
6			B	X	X	X	X	X	X
7			C	√	√	√	√	√	√
8			D	√	√	√	√	√	√
9			E	X	X	X	X	X	X
10			F	√	√	√	√	√	√
11			G	X	√	√	√	√	√
12			H	X	X	X	X	X	X
13	12		A	X	X	X	X	X	X
14			B	X	X	X	X	X	X
15			C	X	X	X	X	X	X
16			D	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

- √ : ada
- X : tidak ada
- : tidak lengkap

3.4 Perancangan Web Portal

Portal web (website portal) adalah sebuah situs web yang menyediakan beragam informasi dari berbagai sumber dengan cara (format/layout) yang seragam. Khusus untuk web portal informasi publik, landasan umum dalam perancangan web portal adalah :

1. Pasal 2 ayat (3)
 - (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Pasal 7 ayat (2) dan (3)
 - (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien

sehingga dapat diakses dengan mudah.

Secara umum model web portal informasi publik adalah sebagai berikut:

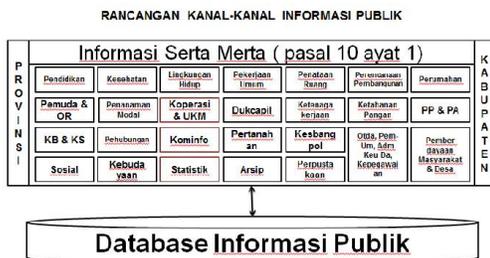


Gambar 1. Akses Web Portal

3.4.1 Kanal Portal Informasi Publik

Kanal-kanal informasi publik harus dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami, sehingga kanal-kanal informasi publik yang dirancang harus bersifat permanen atau tidak berubah-ubah. Rumusan kanal informasi publik yang bersifat permanen mengacu pada pasal 2 ayat 1 PP nomor 38 tahun 2007,

Dengan mengacu pada ketentuan diatas maka kanal-kanal informasi publik disusun sebagai berikut :



Gambar 2. Rancangan Kanal Informasi Publik

3.4.2 Rancangan Konten Kanal Portal Informasi Publik

Konten tiap kanal informasi publik disusun berdasarkan ketentuan UU No. 14 tahun 2008, bahwa informasi publik terdiri dari :

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala.

2. informasi yang wajib disampaikan secara serta merta.
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dengan demikian, rancangan konten informasi publik adalah sebagai berikut :



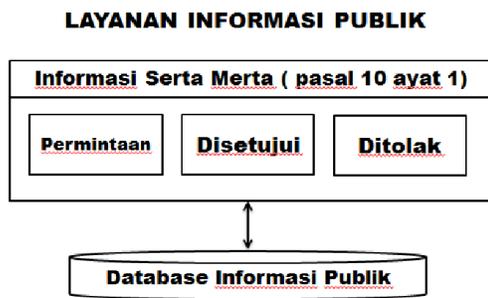
Gambar 3. Rancangan Konten Informasi Publik

3.4.3 Rancangan Layanan Portal Informasi Publik

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut

Dengan demikian, model layanan informasi publik adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Layanan Informasi Publik

4. KESIMPULAN

Dari 6 (enam) sampel website pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah di analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan situs masih bersifat informatif dan didukung dengan konten informasi yang berkualitas (akurat, terkini dan relevan)
2. Ketersediaan konten-konten informasi pada situs pemerintah berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 sebesar 43%
3. Diperlukan peningkatan layanan atau fungsi pada situs pemerintah menjadi interaktif dengan menambah konten-konten informasi publik dalam bentuk web portal agar sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Effendi, Sofian. 2009. "Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif", Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- [2] ----- . 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [3] ----- . 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [4] Sutrisno, Ashari& Istiyanto, Jazi Eko. 2009. "Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia". Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN "Veteran", Yogyakarta
- [5] Banciu, Diona. 2009. "e-Romania-A Citizens' Gateway towards Public Information". National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest
- [6] Heng, Wang& Jinchang, Hou. 2010. "An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government". Paper in Computer Science ang Information Technology IEEE International Conference, Chengdu.